

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori Keagenan (*agency theory*) yakni teori menguraikan keterkaitan *principal* dengan *agent*. Teori agensi awalnya dicetus oleh Jensen dan Meckling tahun 1976. Jensen dan Meckling (1976) mengartikan keterkaitan agensi serupa kontrak satu / lebih orang *principal* yang mempekerjakan *agent* dalam menjalankan tugas tertentu. Keterkaitan keagenan terjadi saat pihak *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* guna mengelola perusahaan dengan harapan bisa memperoleh keuntungan guna kepentingan *principal*. Eisenhardt (1989) teori agensi berlandaskan pada tiga asumsi mengenai karakteristik manusia, yakni bersifat egois serta mempunyai keterbatasan dalam berpikir rasional mengenai masa depan (rasionalitas terbatas), dan umumnya menghindari risiko (*risk averse*). Karena karakteristik tersebut, manajer lebih cenderung bertindak demi kepentingan pribadinya dengan menerapkan manajemen pendapatan, yang pada akhirnya bisa memicu konflik agensi (Handoyo & Kusumaningrum, 2022).

Principal sebagai pihak yang pemilik investasi tentu mengharapkan keuntungan maksimal dari modal ditanamkan agar bisa mengembangkan nilai investasi. *Agent* sebagai pengelola perusahaan yang mempunyai informasi lebih terhadap operasional perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin guna memperoleh imbalan optimal melalui pemilihan metode atau kebijakan spesifik

dalam penyusunan laporan keuangan sedemikian mungkin selaras dengan keinginan mereka tanpa memperhatikan kepentingan lain, sehingga bisa menciptakan ketimpangan informasi karena manajemen menguasai informasi perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan pemilik. Manajer lebih fokus pada kompensasi finansial, sementara *principal* mengutamakan keuntungan, sehingga menyebabkan asimetri informasi, di mana manajer cenderung menyembunyikan atau menyaring informasi demi kepentingan pribadi (Fitri & Siswantoro, 2021).

Manajemen laba, dalam hakikat terdalamnya, merupakan gejala yang muncul dari akar persoalan klasik dalam dunia tata kelola perusahaan yang disebut dengan *agency theory* atau teori keagenan, sebuah teori yang menggambarkan dinamika relasi antara dua entitas utama dalam struktur korporasi *principal* (pemilik modal) dan *agent* (pengelola atau manajer) hubungan ini, meskipun terjalin atas dasar kontrak dan harapan saling menguntungkan, kerap kali dipenuhi oleh arus bawah konflik kepentingan yang tidak kasatmata namun sangat nyata dampaknya di mana sang *principal* menghendaki optimalisasi profitabilitas perusahaan demi pengembalian investasi yang maksimal, sementara *agent* justru lebih terpaku pada agenda pribadi seperti pemenuhan kebutuhan ekonomi individu, kenyamanan psikologis, kompensasi jangka pendek, atau bahkan peningkatan reputasi pribadi yang mungkin tidak selaras dengan tujuan perusahaan secara jangka panjang.

Ketimpangan informasi atau *asymmetry information* menjadi bahan utama dari konflik keagenan tersebut, menciptakan medan yang tidak seimbang di mana agen memiliki akses penuh terhadap seluruh data dan proses operasional, sedangkan *principal* hanya memperoleh informasi dari laporan-laporan yang telah direkayasa

atau dikemas sesuai narasi yang menguntungkan agen—dan disinilah praktik manajemen laba berkembang biak, tersembunyi di balik angka-angka indah yang menghipnotis namun menyesatkan. Ketika informasi dimonopoli dan kepentingan sepihak, maka kepercayaan menjadi komoditas langka, dan skandal akuntansi pun tinggal menunggu waktu untuk meledak di hadapan publik dampaknya bukan hanya pada kinerja perusahaan, tetapi juga pada komoditas pasar yang penuh ketidakpastian, menciptakan efek buruk yang meruntuhkan kepercayaan investor, mencoreng integritas lembaga, dan meretakkan kredibilitas sistem keuangan secara luas. Oleh karena itu, memahami manajemen laba tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mendalam terhadap teori keagenan karena di balik setiap angka yang dimanipulasi, tersembunyi kisah panjang tentang relasi kuasa, benturan kepentingan, dan kegagalan komunikasi antara pemilik dan pengelola yang terus berulang dari waktu ke waktu (Wibowo & Surifah, 2022).

2.1.2 Manajemen Laba

Menurut Scott (1977), manajemen laba bukan sekadar aktivitas teknis dalam pemilihan metode akuntansi, melainkan suatu seni ilusi keuangan yang dimainkan oleh tangan-tangan manajerial yang lihai meracik angka-angka demi menciptakan narasi laba yang seolah-olah menggambarkan kesuksesan, padahal di balik laporan keuangan yang tampak rapi itu tersembunyi agenda strategis untuk menyulap kenyataan menjadi ilusi yang menarik perhatian mata para pemangku kepentingan para manajer memanipulasi angka bukan semata-mata untuk menipu, tetapi untuk menyelaraskan ekspektasi pasar, memenuhi ambang batas kontraktual, menenangkan dewan direksi, atau bahkan demi menjaga citra perusahaan agar tetap

terlihat istimewa di dunia usaha yang penuh kompetisi; langkah-langkah mereka, mulai dari pengakuan pendapatan yang dipercepat hingga penundaan beban, praktik ini bukan sekadar manipulasi akuntansi konvensional, melainkan bagian dari strategi retorik yang secara halus mengaburkan batas antara realitas ekonomi dan persepsi laporan, antara fakta dan rekayasa. Ketika tidak diawasi secara ketat, tindakan semacam ini berpotensi menjadi pemicu krisis kepercayaan dan menurunkan kredibilitas laporan keuangan., sehingga manajemen laba tidak bisa dipandang hanya sebagai strategi internal, tetapi sebagai manifestasi dari kompleksitas etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem ekonomi modern.

Langkah manajemen laba sering kali digunakan strategi jangka pendek oleh manajemen untuk mempercantik tampilan laporan keuangan, dengan tujuan menarik perhatian pemilik modal dan publik. Namun, pencitraan ini kerap menciptakan persepsi keberhasilan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, praktik ini seolah-olah menunjukkan performa perusahaan yang meningkat, padahal di balik angka-angka yang direkayasa itu tersembunyi potensi kehancuran nilai perusahaan dalam jangka panjang karena strategi semu ini, alih-alih memperkuat pondasi finansial, justru menggali lubang dalam struktur keuangan yang suatu saat bisa runtuh akibat beban akumulatif yang tidak terlihat. Tindakan ini dapat merusak kualitas informasi keuangan, membuat laporan keuangan tidak lagi menjadi cermin sejati kondisi perusahaan, melainkan menjadi layar kabut yang menutupi realitas dan menjebak para pengambil keputusan dalam persepsi palsu (Surifah dan Wibowo, 2022). Keakuratan dan transparansi yang seharusnya menjadi jantung dari sistem pelaporan keuangan

berubah menjadi elemen yang dipoles demi kepentingan sesaat, dan pada akhirnya menimbulkan resiko besar bagi pemangku kepentingan yang mengandalkan data tersebut untuk merumuskan langkah strategis, mengganggu efisiensi pasar, serta menurunkan kredibilitas dan integritas perusahaan di mata publik.

Dampak praktik manajemen laba bisa menyebabkan kehilangan kepercayaan para pengguna seperti investor, pemegang saham dan kreditor karena laporan keuangan yang disajikan tidak akurat. Merubah angka dalam laporan keuangan yakni bagian dari praktik manajemen laba yang bisa menyebabkan ketidakstabilan bagi para pemangku kepentingan dan bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan jangka panjang (Merchant & Rockness, 1994). Healy & Wahlen (1999) menguraikan bahwa jenis manajemen laba yang banyak dipakai yakni manajemen laba akrual, manajemen menerapkan kebijakan pemilihan metode akuntansi guna mempengaruhi laba tidak berimbas langsung ke arus kas. Dari penjelasan sebelumnya bisa disimpulkan bahwa manajemen laba yakni suatu langkah manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan akuntansi selaras standar yang berlaku guna kepentingan pribadi, sehingga bisa mempengaruhi angka – angka pada laba informasi laporan keuangan hal ini bisa menimbulkan dampak yang negatif terhadap nilai perusahaan.

Menurut Scott (2015) para manajer perusahaan menjalankan manajemen laba termotivasi oleh hal berikut yakni :

1. *Bonus Plan*, manajer akan diberikan insentif dalam mengelola laporan keuangan sedemikian rupa agar laba yang dilaporkan selaras dengan target

guna mencapai bonus. Akibatnya manajer memakai kebijakan akuntansi tertentu demi memaksimalkan laba.

2. *Debt Covenant*, adalah batasan yang disepakati dalam perjanjian utang antara perusahaan dan kreditor dengan tujuan guna memenuhi syarat tertentu guna melindungi kepentingan kreditor. Rasio utang dan modal tinggi biasanya dipilih dengan metode akuntansi sehingga memungkinkan manajer menjalankan langkah ini guna menghindari perjanjian utang.
3. *Political Motivation*, perusahaan berupaya mengurangi laba yang dilaporkan guna menghindari daya tarik lebih oleh pemerintah hal ini bisa menimbulkan biaya politik tambahan.
4. *Tax Motivation*, manajer perusahaan menjalankan manajemen laba dengan motivasi perpajakan, yakni mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara menyajikan laba fiskal serendah mungkin pada laporan keuangan.
5. *International Public Offering (IPO)*, ketika perusahaan ingin go public ataupun sudah go public maka laporan keuangan menjadi perhatian utama bagi investor, situasi ini manajer cenderung menjalankan manajemen laba dengan menaikkan laba sebagai upaya menarik minat investor.

Menurut Scott (2015) ada berbagai pola manajemen pendapatan yang diupayakan manajer yakni :

1. *Taking a Bath*

Pola *taking a bath* diterapkan saat perusahaan mengalami restrukturisasi organisasi seperti pergantian CEO baru. Pola ini dikerjakan dengan cara

mengembangkan kerugian yang tinggi pada laporan keuangan dibandingkan dengan periode sebelumnya dengan menghapus aset atau memperhitungkan biaya di masa mendatang agar laba di masa mendatang terlihat lebih tinggi.

2. *Income Minimization*

Pola *Income Minimization* diterapkan ketika perusahaan ingin menjaga laba dengan cara menampilkan laba yang lebih rendah dalam laporan keuangan dibandingkan laba periode sebelumnya. Pola ini umumnya dianggap aman ketika nilai profitabilitas perusahaan mengalami kenaikan yang tinggi. Pola ini bisa diterapkan melalui berbagai cara seperti menghapus aset tetap dan aset tidak berwujud, membebaskan biaya iklan, atau mengakui pengeluaran riset dan pengembangan (R&D) sebagai biaya. Biasanya perusahaan menjalankan income minimization termotivasi oleh aturan perpajakan dan faktor – faktor politik.

3. *Income Maximization*

Pola *Income Maximization* diterapkan saat perusahaan ingin memaksimalkan laba pada laporan keuangan, saat laba pada periode berjalan turun dalam situasi ini perusahaan akan melaporkan pendapatan yang lebih tinggi. Pendapatan bisa dimaksimalkan dengan cara mempercepat pengakuannya atau dengan menunda pengakuan atas biaya.

4. *Income Smoothing*

Pola *Income Smoothing* dipakai guna memperlihatkan laba pada posisi stabil dari period ke periode berikutnya. Bagi manajer yang ingin menghindari risiko stabilitas laba bisa membantu guna konsistensi kompensasi. Pola ini juga

membantu menghindari pelanggaran perjanjian hutang dalam jangka panjang yang bisa terjadi saat laba berfluktuasi secara drastis.

Praktik manajemen laba di Indonesia bisa didorong oleh beberapa faktor, seperti kepentingan pajak dan biaya politik. Perusahaan menerapkan pola *Income Decreasing* guna menekan kewajiban pajak dengan diturunkannya laba yang dilaporkan (Indra Kusuma dan Mertha, 2021).

2.1.3 *Good Corporate Governance* (GCG)

Konsep *Good Corporate Governance* pertama kali mengemuka secara sistematis melalui buah pikir Cadbury Committee pada tahun 1992, yang kala itu menjadi tonggak sejarah bagi perubahan paradigma dalam dunia korporasi modern di mana praktik bisnis tidak hanya soal mengejar keuntungan semata, melainkan juga soal bagaimana keuntungan itu diraih, melalui proses yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika, transparansi, dan akuntabilitas yang berkelanjutan. Cadbury Committee memaknai GCG sebagai serangkaian struktur dan mekanisme yang dirancang sedemikian rupa untuk mengarahkan, mengendalikan, sekaligus mengawasi denyut nadi operasional perusahaan agar senantiasa bergerak dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan ke pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Dalam laporannya yang monumental, komite ini menyoroti empat elemen fundamental yang menjadi pilar dari tata kelola yang sehat: transparansi, yang menuntut keterbukaan informasi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak publik; akuntabilitas, yang mewajibkan setiap tindakan korporasi dapat ditelusuri dan dinilai; tanggung jawab sosial dan etis dalam setiap kebijakan; serta

keadilan, yang menegaskan pentingnya perlakuan setara dan adil ke semua pihak. Maka dari itu, GCG bukanlah sekadar dokumen kebijakan, tetapi merupakan ruh yang menghidupi arah gerak perusahaan agar tidak terjebak dalam praktik oportunistik, melainkan berdiri tegak sebagai institusi yang bermartabat di tengah arus deras dinamika ekonomi global.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) selaku salah satu lembaga internasional yang menjadi panutan dalam pembentukan standar tata kelola global, dengan penuh ketegasan menyatakan bahwa GCG bukanlah sekadar alat kendali atau instrumen pengawasan semata, melainkan merupakan suatu kerangka menyeluruh yang dirancang demi memastikan bahwa seluruh aspek pengelolaan perusahaan berjalan dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, serta selaras dengan kepentingan luas dari seluruh pemangku kepentingan, tidak terbatas pada pemegang saham saja. Dalam pandangan OECD, GCG adalah elemen berkelanjutan yang mendukung nilai transparansi dan keterbukaan informasi ke dalam setiap sendi operasional perusahaan di mana kejujuran dalam pelaporan, kejelasan dalam struktur pengambilan keputusan, serta kesetaraan dalam memperlakukan seluruh pihak yang berkepentingan menjadi pilar utama dalam menciptakan tatanan korporasi yang berkeadilan dan berintegritas. Melalui implementasi tata kelola yang bersandar pada prinsip-prinsip tersebut, perusahaan tidak hanya memperkuat pondasi akuntabilitasnya, namun juga menanamkan benih kepercayaan yang dalam dari publik, mitra bisnis, investor, hingga masyarakat luas sehingga terciptalah ekosistem korporasi yang bukan hanya efisien dan produktif,

tetapi juga etis, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan zaman yang kian kompleks dan dinamis.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menerapkan 5 prinsip utama asas *Good Corporate Governance* pada perusahaan guna mencapai kelangsungan bisnis yang berkelanjutan yakni :

1. Transparansi

Prinsip ini menekankan keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang nyata dan relevan atas kinerjanya. Informasi yang disampaikan harus mudah diperoleh pengguna kepentingan.

2. Akuntabilitas

Mengharuskan perusahaan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara gamblang dengan adanya kejelasan fungsi, penyelenggaraan dan tanggungjawab setiap organ perusahaan hingga pengelolaan perusahaan terapai.

3. Responsibilitas

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap oknum hukum serta pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan serupa menjaga kesinambungan operasional perusahaan dalam jangka panjang..

4. Independensi

Prinsip ini menekankan pada pengelolaan perusahaan secara independen yakni perusahaan tidak boleh menerima intervensi dari pihak tertentu yang bertentangan dengan perpu serta berpegang pada ketentuan hukum.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Prinsip ini mengharuskan perusahaan guna diberikannya kebebasan kepada para pemangku kepentingan dalam berpendapat serta memastikan kemudahan dalam mengakses informasi perusahaan. Kesetaraan dalam hal ini mengharuskan perusahaan memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil.

Menurut Surifah & Rofiqqoh (2020), rangkaian kerja GCG yakni keterkaitan sistem, prosedur, juga tahapan diterapkannya elemen – elemen perusahaan, seperti RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, sekretaris perusahaan dan komite agar menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham serta kerap memperhatikan kepentingan pihak terkait pemangku kepentingan *stakeholders* lainnya. Safitri *et al.*, (2020) menguraikan bahwa GCG yakni sistem pengelolaan perusahaan yang direka-reka guna mengelola perusahaan dengan tujuan mengembangkan kinerja perusahaan, dilindunginya kepentingan *stakeholders*, serta memastikan kepatuhan peraturan yang berlaku serta nilai dan etika yang ditetapkan. Berdasarkan uraian diatas bisa disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah kerangka pengelolaan perusahaan yang bertujuan agar meningkatkan kinerja perusahaan lewat prinsip – prinsip sistem pengelolaan yang efektif, komprehensif, dengan pendekatan transparan dan akuntabel guna mewujudkan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

2.1.3.1 Rangkaian kerja *Good Corporate Governance*

Rangkaian kerja *GCG* yakni rangkaian prosedur serta keterkaitan tegas antar pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan pihak memantau serta mengontrol keputusan tersebut (Widiatantri *et al.*, 2023).

1. Komisaris Independen

Berdasarkan POJK nomor 57/POJK.04/2017 menyatakan bahwa dewan komisaris independen yakni anggota dewan komisaris yang terhubung langsung dengan perusahaan dan dipenuhinya kriteria yang ditetapkan guna komisaris independen selaras dengan Pernyataan Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Surifah & Wibowo (2022) menguraikan bahwa dewan komisaris berada di posisi tertinggi struktur pengelolaan internal perusahaan serta memegang peran krusial khususnya dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Tanggung jawab utama komisaris independen yakni mendorong penerapan prinsip tata kelola perusahaan baik dalam perusahaan dengan berperan aktif dalam memperkuat posisi dewan komisaris supaya bisa menjalankan tugas pengawasan dan memberikan saran ke direksi yang lebih baik sehingga bisa memberikan manfaat dan nilai tambah bagi perusahaan (Wahyuningsih, 2020).

2. Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Nomor 55/POJK.04/2015, keberadaan komite audit tidak sekadar menjadi formalitas struktural dalam tubuh perusahaan, melainkan sebagai representasi strategis dari Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan yang lebih spesifik dan mendalam dalam

mengawal integritas dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan, sebab komite ini dibentuk secara khusus guna memperkuat fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris terhadap jalannya manajemen perusahaan secara menyeluruh. Dalam praktiknya, komite audit menjalankan peran strategis sebagai pengamat yang tajam terhadap denyut keuangan korporasi, memberikan evaluasi kritis dan masukan profesional atas berbagai kebijakan akuntansi, keuangan, serta sistem pengendalian internal perusahaan yang menjadi pondasi utama dalam menciptakan transparansi dan keandalan informasi keuangan (Tamara et al., 2022). Tidak hanya itu, menurut Indonesian Institute of Audit Committee, komite audit juga memikul tugas mulia dalam memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan efektif, laporan keuangan memenuhi standar kualitas tertinggi, serta audit internal dilakukan secara menyeluruh dan objektif, semua ini dirangkai dalam satu misi besar untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang sehat. Tanggung jawab komite audit pun menjalar hingga ke area identifikasi dan evaluasi risiko strategis yang dihadapi perusahaan, serta pengawasan atas kepatuhan terhadap berbagai regulasi dan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan bahwa perusahaan tidak menyimpang dari rel transparansi, keadilan, dan integritas dalam menghadapi dinamika industri yang terus berubah dan penuh tekanan eksternal maupun internal.

3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial, dalam hakikatnya, bukan sekadar representasi angka dalam struktur saham, melainkan merujuk pada pihak manajemen seperti manajer, direktur, atau komisaris yang turut serta dalam proses pengambilan keputusan perusahaan serta memiliki kesempatan untuk memiliki saham (Rusmanto dan Setyaningrum, 2021). Kepemilikan sebagian saham oleh manajer menempatkan mereka dalam peran ganda sebagai pengambil keputusan dan pihak yang turut menanggung dampak dari keputusan tersebut. Peran ini mencerminkan keterkaitan fungsional antara tanggung jawab operasional dan kepentingan kepemilikan, sehingga kebijakan yang diambil cenderung dipengaruhi oleh perpaduan antara kepentingan pribadi dan tujuan perusahaan. (Winarta et al., 2021). Dalam perspektif akademik yang lebih dalam, Sehwat et al. (2019) mengidentifikasi dua pendekatan analitis yang digunakan untuk mengkaji dampak kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba: pertama, pendekatan “efek pengukuhan” yang menggambarkan bagaimana kepemilikan saham oleh manajer justru dapat memperuncing ketidaksepahaman antara manajer dan pemegang saham lainnya, karena munculnya otoritas internal yang bisa memanipulasi keputusan demi kepentingannya sendiri; dan kedua, pendekatan “efek penyelarasan insentif” yang justru menegaskan bahwa kepemilikan manajerial dapat menjembatani celah kepentingan, menyelaraskan tujuan antara manajer dan pemilik, sehingga meningkatkan loyalitas serta kualitas pengambilan

keputusan. Kedua pendekatan ini bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan dua lensa penting yang saling melengkapi dalam memahami kompleksitas hubungan antara kepemilikan dan kontrol, yang pada akhirnya menuntut kepekaan analisis terhadap potensi konflik maupun harmoni insentif yang tersembunyi di balik angka saham dan laporan keuangan yang tersaji secara formal.

4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional bukanlah sekadar statistik dalam komposisi saham suatu entitas, melainkan sebuah mekanisme kontrol eksternal yang sarat dengan pengaruh strategis dan potensi dominasi terhadap arah kebijakan manajerial, sebab ketika saham suatu perusahaan berada dalam genggaman lembaga besar seperti pemerintah, korporasi swasta, maupun investor asing, maka otomatis terbentuklah struktur pengawasan yang jauh lebih sistematis dan intens, sebagaimana dijelaskan oleh Siti Nuridah et al. (2023); terlebih bila kepemilikan tersebut melampaui ambang batas 5%, maka pemiliknya dikategorikan sebagai blockholder, suatu posisi yang bukan hanya bersifat simbolis, tetapi mengandung otoritas yang cukup untuk mengintervensi kebijakan manajerial, termasuk dalam pengendalian keputusan strategis yang menyangkut keberlangsungan bisnis. Pendapat ini dikuatkan oleh Pedersen et al. (2001), yang menekankan bahwa keberadaan blockholder dapat menjadi instrumen penyeimbang kekuasaan dalam korporasi, berfungsi sebagai pengawas independen yang mampu menekan eksesifitas kekuasaan manajemen. Sejalan dengan hal tersebut, Prastika &

Widodo (2020) menegaskan bahwa kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam meredam praktik manajemen laba, sebab entitas yang mewakili kepemilikan ini menjalankan pengawasan melalui mekanisme monitoring yang efisien dan tidak mudah dikelabui oleh rekayasa laporan keuangan. Oleh karena itu, semakin banyak perusahaan dengan komposisi kepemilikan institusional yang signifikan, maka semakin terbatas pula peluang bagi manajemen yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan manipulasi terhadap informasi keuangan perusahaan, karena pengawasan ketat dari pemegang saham institusional bertindak layaknya pagar moral sekaligus benteng transparansi dalam iklim tata kelola korporasi yang sehat dan bertanggung jawab.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Rangkuman Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Hasil
1.	Sehrawat <i>et al.</i> (2019)	Independen: Ukuran dewan, CEO dualitas, audit panitia kemerdekaan, kepemilikan manajerial. Dependen : Manajemen Laba	CEO dualitas berpengaruh positif. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Selainnya ukuran dewan, audit panitia kemerdekaan tidak berpengaruh.
2.	Rachman (2020)	Independen: keahlian keuangan komite audit, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, konsentrasi kepemilikan, direktur	Kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, Keahlian keuangan komite audit, konsentrasi kepemilikan, dan

		berkewarganegaraan, aktivitas dewan komisaris Dependen: Manajemen laba	direktur berkewarganegaraan asing tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan aktivitas dewan komisaris berpengaruh.
3.	Fitri & Siswanto (2021)	Independen: Partisipasi organisasi islam dalam dewan direksi, ukuran dewan direksi, dewan direksi independen, latar belakang keuangan dewan direksi, ukuran komite audit, komite audit independen, latar belakang keuangan komite audit Dependen : Manajemen Laba	Ukuran komite audit, berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan Partisipasi organisasi islam dalam dewan direksi, ukuran dewan direksi, dewan direksi independen, latar belakang keuangan dewan direksi, komite audit independen, latar belakang keuangan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
4.	Utami et al., (2022)	Independen: Dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik Dependen: Manajemen laba	Kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional dan kepemilikan publik berpengaruh negatif. Sedangkan dewan komisaris berpengaruh positif
5.	Handoyo & Kusumaningrum (2022)	Independen: Dewan komisaris independen, komite audit independen, kepemilikan manajerial, kebijakan dividen Dependen: Manajemen laba	Dewan komisaris independen, komite audit independen, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan kebijakan dividen berpengaruh negatif
6.	Tamara <i>et al.</i> (2022)	Independen: Dewan komisaris independen, komite audit,	Komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan berpengaruh

		kepemilikan manajerial, profitabilitas, ukuran perusahaan. Dependen: Manajemen laba	negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh
7.	Kurniawan & Fuad (2022)	Independen: Ukuran komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, leverage, kualitas audit, profitabilitas Dependen : Manajemen Laba	Ukuran komite audit berpengaruh positif. Kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif. Kepemilikan institusional, leverage dan kualitas audit institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan profitabilitas berpengaruh positif.
8.	Hapsari <i>et al.</i> (2022)	Independen: Kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen, komite audit Dependen: Manajemen laba	Kepemilikan manajerial, komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif
9.	Immanuel et al. (2022)	Independen: Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial. Dependen: Manajemen laba	Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh.
10.	Lestari <i>et al.</i> (2022)	Independen: Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, Dependen: Manajemen laba	Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh.
11.	Zamzam et al. (2023)	Independen: Dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit	Dewan komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh. Sedangkan komite audit

		Dependen: Manajemen laba	berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
12.	Putri <i>et al.</i> (2024)	Independen: Audit independen, dewan direksi, direksi independen, kepemilikan institusional dan komisaris independen. Dependen: Manajemen laba	Kesulitan keuangan, likuiditas, leverage, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan profitabilitas berpengaruh.

Sumber: Berbagai sumber

2.3 Kerangka Pemikiran

Salah satu faktor yang memicu praktik manajemen laba yakni adanya pendelegasian kekuasaan dari *principal* kepada manajer. Keadaan ini menciptakan perbedaan kepentingan, *principal* berharap memperoleh pengembalian investasi yang tinggi, sedangkan manajer lebih fokus pada cara guna memperlihatkan kinerja yang optimal agar mendapatkan imbalan atau bonus yang lebih besar. Cara mencapai tujuan tersebut manajer akan berusaha memenuhi harapan prinsipal dengan manipulasi angka laba pada informasi laporan keuangan. Sisi lain manajemen laba dimaksudkan guna menciptakan stabilitas dalam kinerja perusahaan. Namun, dampak dalam jangka akan menimbulkan penurunan kualitas laporan keuangan yang berpotensi menyesatkan investor dan pemangku kepentingan lainnya dan menurunnya kepercayaan publik terhadap perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) tidak hanya dipahami sebagai konsep formal tata kelola perusahaan, melainkan sebagai mekanisme penting yang dirancang untuk mengurangi potensi terjadinya praktik manajemen laba. GCG diwujudkan melalui empat pilar utama, yaitu komisaris independen, komite audit,

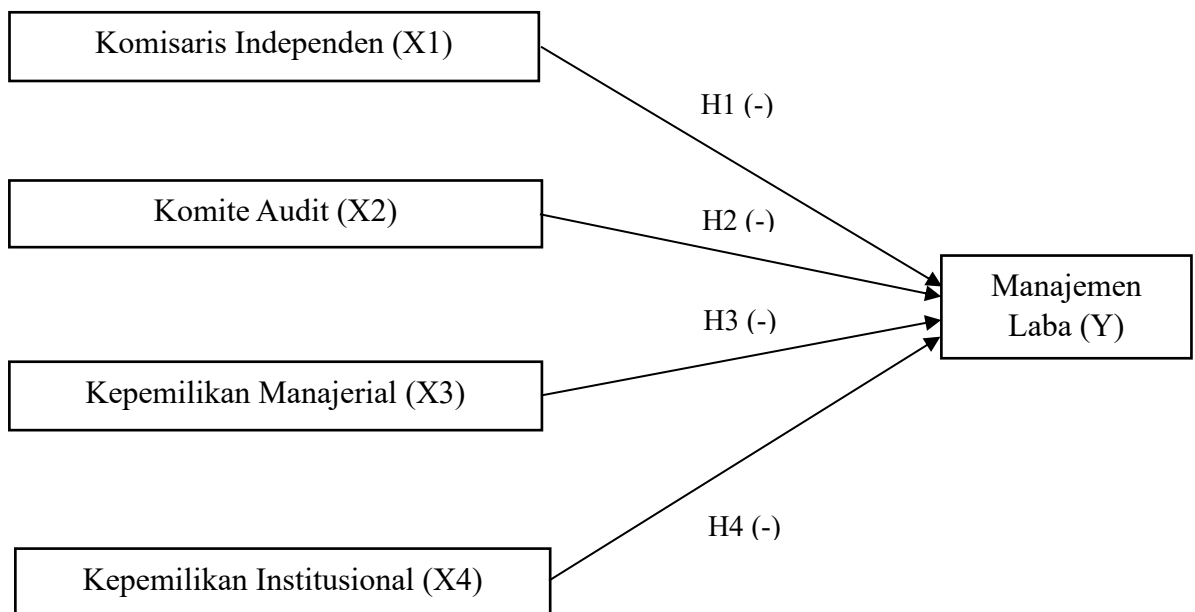
kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif.

Komisaris independen berfungsi sebagai pengawas eksternal yang objektif dan bebas dari konflik kepentingan internal. Komite audit bertugas menelaah laporan keuangan secara menyeluruh guna memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan mencegah penyimpangan informasi. Kepemilikan manajerial berperan dalam menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham, sehingga mendorong perilaku pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sementara itu, kepemilikan institusional dapat meningkatkan kualitas pengawasan karena pihak institusi umumnya memiliki kapasitas dan kepentingan jangka panjang terhadap keberlangsungan perusahaan. Keberadaan mekanisme GCG tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga untuk membentuk budaya tata kelola yang sehat di dalam perusahaan. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran yang menjadi dasar GCG, diyakini mampu menciptakan lingkungan pengambilan keputusan yang lebih disiplin dan terkontrol. Dengan demikian, GCG tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai pondasi strategis dalam menjaga kredibilitas, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendorong pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Keempat elemen tersebut, apabila berjalan secara sinergis, diharapkan mampu menekan tindakan oportunistik dalam pelaporan keuangan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini mengajukan empat hipotesis yang bisa digambarkan melalui gambar 2.1 sebagai berikut.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba

Komite Nasional Tata Kelola Perusahaan menyatakan bahwa komisaris independen yakni dewan komisaris tidak terafiliasi dengan perusahaan dan mempunyai independensi berperan dalam pengawasan terhadap kebijakan manajemen dan memastikan transparansi pada laporan keuangan. Berdasarkan penelitian Immanuel et al (2022), Hapsari et al (2022) dan Finota & Fitra (2021) menyatakan bahwa komisaris independen berdampak negatif ke manajemen laba. Keberadaan dewan komisaris independen bertujuan guna membangun lingkungan bisnis yang berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan, dengan penerapan tata

kelola yang efektif peluang terjadinya praktik manajemen laba bisa ditekan seminimal mungkin (Hapsari *et al.*, 2022). Keberadaan dewan komisaris independen bisa dikurangnya adanya praktik manajemen laba pengawasan terhadap kebijakan manajer.

Konteks teori agensi, dimana munculnya permasalahan antara *principal* dan *agent* menjadi masalah mendasar yang mengemuka akibat perbedaan kepentingan yang sering kali tidak terhindarkan, keberadaan komisaris independen dapat dipandang sebagai solusi jitu untuk mereduksi perpecahan ini. *Principal*, yang berfokus pada pencapaian keuntungan jangka panjang, sering kali dihadapkan pada manajer (*agent*) yang lebih tertarik pada keuntungan pribadi dan insentif jangka pendek, yang akhirnya menciptakan asimetri informasi yang signifikan, mengingat manajer memiliki akses lebih besar terhadap informasi operasional perusahaan. Dalam situasi semacam ini, komisaris independen berfungsi sebagai penjaga keseimbangan yang menekan perilaku oportunistik yang mungkin muncul dari pihak manajerial, seperti upaya untuk memperbesar laba jangka pendek demi kepentingan pribadi atau bonus yang lebih besar. Komisaris independen mempunyai peran sebagai pihak netral dan objektif, bebas dari kepentingan langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga mampu mengawasi dengan lebih tajam dan kritis, mengurangi peluang bagi manajer untuk memanipulasi angka demi tujuan sesaat. Dengan demikian, keberadaan mereka tidak hanya mengurangi ketimpangan informasi antara *principal* dan *agent*, tetapi juga menjamin integritas dan keakuratan informasi yang disajikan kepada para

pemangku kepentingan, menciptakan sistem pengelolaan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran komisaris independen dalam konteks manajemen laba sangat strategis, mengingat mereka berfungsi sebagai pengawas yang bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh manajer tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga mendukung kualitas dan integritas laporan keuangan perusahaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Pratiwi & Noegroho (2022), komisaris independen bertugas memberikan pengawasan yang objektif dan netral, tanpa adanya kepentingan pribadi, sehingga mereka mampu menilai secara jernih kebijakan-kebijakan yang berpotensi mengganggu transparansi laporan keuangan. Dengan tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan, komisaris independen memiliki keunggulan dalam menghindari konflik kepentingan yang sering kali menjadi sumber manipulasi laporan keuangan. Pengawasan yang dilakukan dengan penuh integritas dan objektivitas ini diharapkan dapat mengurangi perilaku oportunistik dari manajer yang bisa saja memanfaatkan praktik manajemen laba untuk tujuan pribadi atau jangka pendek. Sebagai pihak yang memegang peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip transparansi, komisaris independen menjadi garda terdepan dalam meminimalkan potensi manajemen laba yang dapat merusak kredibilitas laporan keuangan perusahaan, sesuai dengan harapan yang dikemukakan oleh Septiandi et al. (2025), yaitu untuk menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga transparan dan bertanggung jawab.

H1 : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.4.2 Pengaruh komite audit terhadap manajemen laba

Komite audit, dalam lanskap tata kelola perusahaan modern, menjelma sebagai sekelompok penjaga gerbang integritas yang dibentuk langsung oleh dewan komisaris guna menjadi alat pengawasan yang tajam dan tanpa kompromi, khususnya dalam wilayah yang penuh teka-teki seperti pelaporan keuangan serta pelaksanaan audit baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sebagaimana dikemukakan oleh Tamara et al. (2022), komite audit bukan sekadar kelompok administratif pasif, tetapi merupakan entitas aktif yang memikul beban berat tanggung jawab untuk menelaah, mengkritisi, dan memberikan pendapat mendalam terhadap kebijakan keuangan perusahaan, sistem akuntansi yang diterapkan, serta efektivitas pengendalian internal yang dijalankan. Dalam skenario idealnya, komite audit bekerja bukan hanya untuk menemukan kesalahan, tetapi mengendus aroma deviasi sejak jauh sebelum angka-angka itu tersaji dalam laporan keuangan; mereka adalah radar yang mendeteksi potensi penyimpangan sejak dari niat dan perencanaan. Keberadaan mereka seolah menjadi dinding transparansi yang membatasi ruang gerak manajer dalam melancarkan praktik manipulatif terhadap laba. Tidak hanya fungsi pengawasan yang menjadi senjata utama, tetapi juga kedalaman perspektif yang mereka bawa hasil dari kombinasi keahlian multidisipliner dalam bidang keuangan, akuntansi, dan audit yang terintegrasi di dalam tubuh komite tersebut, yang memungkinkan diskusi-diskusi strategis berkualitas tinggi untuk menetralisasi potensi rekayasa pelaporan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Siswantoro (2021), Zamzam et al. (2023), dan Tamara et al. (2020) semakin memperkuat narasi ini dengan

menyingkap bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba, artinya semakin kuat dan terstruktur peran komite audit, maka semakin kecil peluang para manajer untuk memoles laporan keuangan dengan kilau semu laba yang dimanipulasi apalagi jika jumlah anggota komite audit diperbanyak secara proporsional dan selektif, karena dengan bertambahnya jumlah anggota, maka bukan hanya kuantitas pengawasan yang meningkat, tetapi juga kualitasnya terjadi pertukaran perspektif, pengalaman, dan keahlian yang menciptakan semacam ekosistem kolektif pengawasan berbasis akuntabilitas, yang menjadikan fungsi monitoring terhadap laporan laba lebih tajam, lebih bijak, dan lebih sulit untuk dilampaui dengan trik-trik akuntansi oportunistik. Tamara et al. (2022) menegaskan bahwa semakin banyak anggota yang kompeten di dalam tubuh komite audit, maka semakin efektif pengawasan yang dapat dilaksanakan, sebab kerja kolektif yang berjalan di atas prinsip kehati-hatian, saling silang pendapat, serta telaah mendalam akan mempersempit ruang abu-abu yang kerap dimanfaatkan manajer untuk memperindah laporan laba.

Konteks teori agensi, dimana ketegangan antara *principal* dan *agent* sering kali muncul akibat perbedaan kepentingan yang tidak terhindarkan, peran komite audit menjadi sangat penting dalam mereduksi potensi konflik ini. *Principal*, yang berfokus pada pencapaian keuntungan jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan, sering kali menghadapi tantangan dari manajer (*agent*) yang lebih terpusat pada kepentingan pribadi dan insentif jangka pendek, yang dalam banyak kasus dapat menciptakan asimetri informasi yang signifikan. Mengingat manajer memiliki akses yang lebih luas terhadap operasi dan informasi internal perusahaan,

hal ini membuka peluang bagi mereka untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, termasuk dengan cara-cara manipulatif seperti praktik manajemen laba. Komite audit berfungsi untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan standar kebijakan yang berlaku dalam hal pelaporan keuangan, sehingga asimetri informasi yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi tersebut dapat diminimalkan. Keberadaan komite audit secara efektif menekan insentif manajer dilibatkan dalam praktik manajemen laba, memberikan pengawasan mendalam dan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan adalah akurat dan transparan, sehingga menciptakan keseimbangan antara kepentingan *principal* dan *agent* serta menjaga integritas informasi yang diterima oleh pemangku kepentingan perusahaan (Riani *et al.*, 2022).

Komite audit yang lebih banyak semakin efektif tahapan audit karena tugas bisa dibagi lebih jelas dan merata sehingga lebih mampu mendeteksi dan mencegah praktik-praktik yang bisa mengurangi kualitas laporan keuangan (Fitri & Siswantoro, 2021). Tugas komite audit yang meliputi pemeriksaan laporan keuangan secara menyeluruh sehingga keberadaan komite audit yang berfungsi efektif bisa mengembangkan kualitas pelaporan keuangan. Makin meningkat anggota komite audit, fungsi pengawasan menjadi lebih efektif, sehingga bisa menurunkan asimetri informasi karena pengawasan perusahaan lebih optimal (Challen & Noermansyah, 2023).

H2 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

2.4.3 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba

Kepemilikan manajerial merujuk pada kondisi di mana pihak manajemen perusahaan memegang sejumlah saham perusahaan, yang memiliki peran signifikan dalam menyelaraskan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Dalam hal ini, manajer yang juga menjadi pemegang saham akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, karena keputusan tersebut langsung berpengaruh pada kesejahteraan pribadi mereka sebagai pemegang saham. Dengan kata lain, kepemilikan saham oleh manajemen berfungsi sebagai mekanisme pengikat yang mengurangi potensi perbedaan kepentingan antara *principal* yang berfokus pada keberlanjutan jangka panjang perusahaan dan *agent* yang mungkin lebih terdorong untuk mencari keuntungan jangka pendek. Hal ini menjadikan manajer cenderung lebih bertanggung jawab dan lebih memperhatikan dampak dari setiap kebijakan yang diambil, karena setiap keputusan yang diambil tidak hanya mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan, tetapi juga nilai investasi pribadi mereka sebagai pemegang saham. Kepemilikan manajerial menjadi instrumen yang sangat penting dalam meminimalisir potensi konflik antara manajemen dan pemegang saham, serta meningkatkan kualitas keputusan yang diambil dalam menjalankan operasional perusahaan. Studi ini sejalan dengan Lestari et al., (2022), Sehwat et al., (2019) dan Kurniawan & Fuad (2022) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial berimbas negatif ke manajemen laba.

Berdasarkan perspektif teori agensi kepemilikan manajerial menjadi rangkaian kerja tata kelola perusahaan yang bisa menyesuaikan kepentingan *principal* dan

agent. Ada dua metode dalam pendekatan ini, salah satunya berfokus pada efek penyelarasan insentif yang bertujuan guna menyesuaikan kepentingan agar lebih selaras dengan situasi yang diinginkan, sehingga hasil yang diperoleh selaras dengan kepentingan satu sama lain (Sehrawat *et al.*, 2019). *Principal* yang menginginkan keuntungan jangka panjang sedangkan *agent* cenderung fokus pada kepentingan pribadi, keberadaan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer memungkinkan ada penyelarasan kepentingan karena *agent* bertindak sebagai *principal* juga sehingga bisa mengurangi motivasi mereka guna menjalankan manajemen laba yang merugikan pemegang saham. Tingkat kepemilikan manajerial bisa menekan praktik manajemen laba, semakin besar porsi saham yang dimiliki manajemen maka kian rendah potensi konflik kepentingan bisa mendorong praktik manajemen laba (Lestari *et al.*, 2022). Keberadaan kepemilikan manajerial diharapkan mampu menjadi rangkaian kerja tata kelola dalam mengurangi praktik manajemen laba karena adanya kesamaan kepentingan *principal* dan *agent*.

Manajer yang memiliki sebagian saham perusahaan cenderung memiliki insentif yang kuat untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang, karena peningkatan nilai tersebut langsung berhubungan dengan keuntungan pribadi mereka sebagai pemegang saham (Nani & Vinahapsari, 2020). Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajer akan lebih berhati-hati dalam pengelolaan laporan keuangan karena dampaknya bukan hanya berisiko bagi perusahaan secara keseluruhan, tetapi juga bagi keuntungan pribadi mereka. Hal ini membuat kepemilikan manajerial berfungsi sebagai mekanisme pengawas internal yang

efektif untuk mencegah praktik manajemen laba yang merugikan perusahaan dan para pemegang saham. Kepemilikan saham oleh manajer juga menciptakan keselarasan antara kepentingan manajemen dan pemegang saham, karena manajer, yang juga menjadi investor, akan cenderung mengelola perusahaan seolah-olah mereka adalah pemegang saham yang berinvestasi untuk jangka panjang. Ini mendorong manajer untuk bertindak lebih transparan dan menghindari manipulasi laporan keuangan, sehingga situasi perusahaan dapat tercermin secara akurat dalam laporan keuangan yang disajikan (Aryanti et al., 2017).

H3 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.4.4 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba

Kepemilikan institusional yakni kepemilikan saham oleh institusi baik bank atau lainnya. Keberadaan ini bisa memberikan pengawasan efektif terhadap manajemen perusahaan karena mempunyai kepentingan yang lebih besar dalam investasinya. Berdasarkan hasil penelitian Immanuel et al., (2022), Felicya & Sutrisno (2020) dan Utami et al., (2021) memperlihatkan bahwa kepemilikan institusional berimbas manajemen laba. Investor institusional diperkirakan mempunyai kemampuan lebih baik dalam mengawasi aktivitas manajemen dibandingkan investor individu. Peningkatan proporsi kepemilikan saham oleh institusi mengurangi kemungkinan manajer menjalankan manipulasi dalam pelaporan laba melalui kebijakan akuntansi (Immanuel *et al.*, 2022).

Berdasarkan perspektif teori agensi kepemilikan institusional berperan sebagai rangkaian kerja pengawasan terhadap manajemen laba. Investor institusional mempunyai dorongan guna memastikan bahwa manajer bertindak selaras dengan

kepentingan pemilik sehingga bisa mengurangi konflik keagenan (Agustin & Widiatmoko, 2022). *Principal* yang menginginkan keuntungan jangka panjang sedangkan *agent* cenderung fokus pada kepentingan pribadi, dengan investor institusional memungkinkan menjadi rangkaian kerja pengawasan karena mempunyai sumber daya dan keahlian yang lebih baik. Perusahaan atau institusi berperan sebagai *principal* yang memberikan kewenangan kepada manajer sebagai *agent* dalam mengelola laba. Peningkatan kepemilikan institusional bisa mengurangi praktik manajemen laba (Immanuel *et al.*, 2022).

Dalam lanskap korporasi yang penuh dengan intrik strategi dan potensi penyimpangan etika, keberadaan investor institusional tidak sekadar menjadi penanam modal pasif, melainkan menjelma sebagai entitas pengawas super-strategis yang memiliki daya ingat tajam dan kapasitas analitis di atas rata-rata. Mereka bukan sekadar pengamat dari kejauhan, tetapi pemeran utama dengan keahlian intelektual, dukungan teknologi, dan koneksi profesional yang memberi mereka kemampuan untuk memonitor perilaku manajerial dari laporan keuangan yang tersusun rapi hingga narasi korporasi yang disampaikan dalam rapat umum pemegang saham. Seperti disampaikan oleh Utami *et al.* (2021), keberadaan investor institusional yang dominan memperkuat sistem pengawasan perusahaan melalui tekanan yang lebih ketat, di mana para manajer harus melangkah lebih hati-hati dalam merangkai laporan laba, sebab mereka sadar bahwa setiap angka dan catatan bisa menjadi subjek telaah kritis oleh para institusi yang tidak mudah dikelabui oleh permainan akuntansi semu. Pengawasan yang konsisten dan

responsif menciptakan tekanan moral bagi manajemen, sehingga upaya manipulatif menjadi lebih sulit dilakukan tanpa risiko terhadap reputasi dan posisi mereka.

Besarnya proporsi kepemilikan institusional menjadi elemen penentu dalam mengintensifkan kontrol terhadap kebijakan manajemen, khususnya terkait laporan keuangan yang kerap dijadikan wahana untuk memainkan persepsi publik terhadap performa perusahaan (Utami *et al.*, 2021). Semakin besar porsi institusi dalam struktur kepemilikan, semakin kecil ruang bagi manajer untuk "bermain cantik" dalam manipulasi angka laba, karena mereka tahu bahwa pemilik institusional tidak hanya menaruh uang, tapi juga menaruh ekspektasi terhadap tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab. Kepemilikan institusional besar bukan hanya soal proporsi saham, tetapi juga mencerminkan kehadiran mekanisme korektif yang mampu mengidentifikasi dan menanggulangi praktik manajemen laba yang bersifat tersembunyi dan sulit terdeteksi; mereka membawa suara yang lebih berat dalam rapat pemegang saham, dengan akses terhadap informasi yang lebih mendalam dan keberanian untuk menindak bila ditemukan penyimpangan, struktur kepemilikan seperti ini membentuk mekanisme kontrol alami yang efektif. Hal ini secara tidak langsung membatasi ruang gerak bagi praktik manajemen laba, sekaligus mendorong perusahaan untuk mempertahankan integritas dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangannya

H4 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.